PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PKK DI DESA KARYA MAKMUR KECAMATAN TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI

Ni wayan Padmi Sawitri[1], Sukarman Kamuli[2], Saleh Al Hamid[3]

[1,2,3]*Universitas Negeri Gorontalo*
E-mail : niwayanpadmisawitri3@gmail.com[1], sukarmankamuli@gmail.com[2], salehalhamid@gmail.com[3]

ABSTRACT

Women's empowerment is a crucial component of village development, which focuses on improving community welfare. The Family Welfare Empowerment Program (PKK) is one of the village government's strategic instruments for encouraging women's participation and independence. This study aims to analyze the role of the village government in empowering women through the PKK program in Karya Makmur Village and identify the obstacles that hinder its implementation. This study used qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and documentation with informants including the Village Head, Village Secretary, Head of the Welfare Section, Chair of the PKK Mobilization Team, and PKK members. The results indicate that the village government has acted as a regulator through policy formulation and allocation of village funds, as a dynamic agent through efforts to mobilize and motivate women's participation, and as a facilitator through the provision of facilities, infrastructure, and training support. However, the implementation of the PKK program still faces obstacles such as budget constraints and low participation among some women due to busy household and work schedules. Optimizing local resources, such as the development of PKK Garden Destinations, is an alternative strategy to increase women's empowerment. This study concludes that synergy between the village government, PKK administrators, and women in the community is crucial to the success of women's empowerment programs at the village level.

Keywords : *Role of Village Government; Women's Empowerment; PKK Program; Karya Makmur Village*

ABSTRAK

Pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dalam pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah desa dalam mendorong partisipasi dan kemandirian perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan melalui program PKK di Desa Karya Makmur, serta mengidentifikasi faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Ketua Tim Penggerak PKK, serta anggota PKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan dan pengalokasian dana desa, sebagai dinamisator melalui upaya penggerakan dan motivasi partisipasi perempuan, serta sebagai fasilitator melalui penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan pelatihan. Namun, pelaksanaan program PKK masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi sebagian perempuan akibat kesibukan rumah tangga dan pekerjaan. Upaya optimalisasi sumber daya lokal, seperti pengembangan *Destinasi Kebun PKK*, menjadi strategi alternatif untuk meningkatkan keberlanjutan pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara pemerintah desa, pengurus PKK, dan masyarakat perempuan sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan perempuan di tingkat desa.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Desa; Pemberdayaan Perempuan; Program PKK; Desa Karya Makmur*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala desa memiliki kewenangan untuk membina kehidupan masyarakat, mengembangkan perekonomian desa, serta mengoordinasikan pembangunan secara partisipatif. Dalam konteks pembangunan desa, peran pemerintah desa tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Pembangunan nasional pada prinsipnya menuntut keterlibatan masyarakat secara adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Namun, praktik pembangunan selama ini belum sepenuhnya mempertimbangkan keadilan gender, sehingga melahirkan berbagai bentuk ketimpangan seperti stereotipe, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, serta beban kerja ganda yang umumnya dialami perempuan (Nurhayati, 2018). Padahal, secara konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kesetaraan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan jenis kelamin, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum (Republik Indonesia, 2008). Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi agenda penting dalam pembangunan untuk memastikan partisipasi dan manfaat pembangunan yang lebih berkeadilan.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa dan potensi lokal. Pembangunan desa didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, yang tidak lagi berfokus semata pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan (Republik Indonesia, 2014). Dana desa pun diarahkan untuk mendukung program-program yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal (Fanzikri, 2019).

Salah satu instrumen penting dalam pemberdayaan perempuan di tingkat desa adalah organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang sejak awal bertujuan membina dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui sepuluh program pokok yang mencakup aspek mental spiritual, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Pemberdayaan perempuan melalui PKK telah menjadi perhatian nasional dan internasional karena dinilai mampu meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan Pendidikan (Trisnawati & Jatiningsih, 2017). Namun demikian, implementasi program PKK di berbagai desa kerap menghadapi kendala, terutama keterbatasan anggaran dan kecenderungan kegiatan yang lebih berfokus pada aktivitas sosial seperti arisan dan posyandu, sehingga tujuan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal (Amaliatulwalidan & Angraini, 2019; Hanis & Marzaman, 2020).

Desa Karya Makmur yang terletak di Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki jumlah penduduk 2.138 jiwa dengan proporsi perempuan mencapai 49,1 persen dari total penduduk (Kantor Desa Karya Makmur, 2024). Kondisi demografis ini menunjukkan bahwa perempuan merupakan sumber daya manusia potensial yang dapat dikembangkan melalui program pemberdayaan. Mayoritas mata pencaharian penduduk desa berada pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani, sementara perempuan

umumnya terlibat dalam pertanian keluarga, usaha rumah tangga, dan perdagangan kecil yang bersifat informal. Meskipun kontribusi perempuan terhadap perekonomian desa cukup signifikan, peran tersebut masih kurang mendapatkan perhatian optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan data administrasi PKK Desa Karya Makmur, tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan PKK mencapai sekitar 65 persen dari total perempuan dewasa, dengan konsentrasi keikutsertaan yang tinggi pada kegiatan Posyandu, Dasa Wisma, dan pemanfaatan pekarangan (Buku Administrasi PKK Desa Karya Makmur, 2024). Berbagai kegiatan PKK telah berjalan cukup aktif, terutama pada bidang kesehatan dan lingkungan. Namun demikian, pelaksanaan program pemberdayaan perempuan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen formal pemerintah desa, potensi partisipasi perempuan, dan dampak nyata program di lapangan. Keterbatasan dukungan sumber daya, fokus kegiatan yang belum optimal pada pengembangan ekonomi produktif, serta partisipasi perempuan yang belum berkelanjutan menjadi indikasi adanya research gap yang perlu dikaji secara mendalam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan melalui program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Karya Makmur, serta mengungkap faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat desa, khususnya dalam meningkatkan efektivitas peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator, dan dinamisator pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Penelitian dilaksanakan di Desa Karya Makmur, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut memiliki kegiatan PKK yang aktif dan relevan dengan fokus penelitian. Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan, Ketua Tim Penggerak PKK, serta perempuan yang aktif dalam kegiatan PKK. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi desa, laporan kegiatan PKK, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sesuai dengan fokus penelitian. Keabsahan data dijaga melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, yang dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta pemeriksaan terhadap proses dan hasil penelitian untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program PKK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Desa Karya Makmur mengalami peningkatan setelah pemerintah desa mengaktifkan dan menguatkan program PKK. Sebelum adanya intervensi pemerintah desa, peran perempuan masih terbatas pada kegiatan sosial rutin seperti arisan, posyandu, dan kegiatan keagamaan. Kegiatan produktif yang berorientasi pada peningkatan ekonomi keluarga, khususnya pengolahan hasil panen dan pemanfaatan pekarangan, belum berjalan secara optimal. Namun, setelah program PKK dijalankan secara terstruktur, perempuan mulai terlibat dalam pelatihan keterampilan, pengolahan produk hasil pekarangan, penyuluhan kesehatan, serta pengelolaan lingkungan. Data partisipasi menunjukkan bahwa sekitar 65% perempuan dewasa aktif mengikuti kegiatan PKK, yang menandakan adanya respons positif terhadap kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat desa.

Pelaksanaan program PKK di Desa Karya Makmur mencakup berbagai bidang kegiatan yang tergabung dalam kelompok kerja (Pokja). Secara ringkas, cakupan kegiatan PKK dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Ringkasan Kegiatan PKK di Desa Karya Makmur

Pokja	Fokus Kegiatan Utama	Bentuk Kegiatan
Pokja I	Pendidikan & Koperasi	Kelompok belajar, PAUD, BKB, koperasi
Pokja II	Pangan & Rumah Tangga	Pemanfaatan pekarangan, sandang, tata laksana rumah tangga
Pokja III	Kesehatan & Lingkungan	Posyandu, kader kesehatan, sanitasi lingkungan

Sumber: Kantor Desa Karya Makmur, 2025

Keberadaan kegiatan pada setiap Pokja menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan perannya secara menyeluruh dalam mendukung implementasi 10 Program Pokok PKK. Hal ini sejalan dengan Teori Peran yang dikemukakan oleh Soekanto dan Silow (2016), yang menyatakan bahwa peran aktor sosial dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Dalam hal ini, pemerintah desa berperan aktif dalam menciptakan ruang partisipasi dan mendorong perempuan agar terlibat dalam pembangunan desa.

Menurut Arif dalam Fannidya Hamdani Zeho (2018:77), fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat adalah mengarahkan masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan, bukan semata-mata membebankan tanggung jawab pembangunan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan menuntut keterlibatan pemerintah secara aktif dan berkelanjutan. Dalam konteks desa, peran tersebut diwujudkan melalui fungsi pemerintah desa sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator.

Di Desa Karya Makmur, sebelum adanya intervensi pemerintah desa melalui program PKK, peran perempuan dalam pembangunan desa masih terbatas pada kegiatan sosial rutin seperti arisan, posyandu, dan kegiatan keagamaan. Kegiatan produktif yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan ekonomi perempuan belum berkembang secara optimal. Namun, setelah program PKK diaktifkan dan diperkuat, perempuan mulai dilibatkan dalam pelatihan keterampilan, pengembangan usaha rumah tangga, penyuluhan kesehatan, serta pengelolaan

lingkungan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan dari objek kegiatan sosial menuju subjek pemberdayaan.

Temuan tersebut selaras dengan Teori Stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1989) yang memandang pemerintah sebagai steward atau pelayan masyarakat yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mengelola sumber daya demi kepentingan bersama. Pemerintah Desa Karya Makmur telah menunjukkan komitmen tersebut melalui penyediaan kebijakan, fasilitas, dan dukungan kelembagaan bagi program PKK. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menunjukkan bahwa prinsip stewardship dalam pemberdayaan ekonomi perempuan masih perlu dioptimalkan.

Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Peran pemerintah desa sebagai regulator diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dan aturan yang mendukung pelaksanaan program PKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Karya Makmur menyusun kebijakan secara partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan kader PKK dan masyarakat. Regulasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penggerak PKK serta Peraturan Desa terkait pengalokasian dana desa untuk program pemberdayaan yang diintegrasikan ke dalam RKPDes dan APBDes.

Kebijakan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan program PKK sehingga kegiatan dapat berjalan lebih terstruktur, transparan, dan merata di setiap dusun. Hal ini sesuai dengan Teori Peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Silouw (2016), yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status sosial yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan harapan masyarakat.

Peran regulator pemerintah desa juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kebutuhan lokal, termasuk dalam pemberdayaan perempuan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orientasi kebijakan masih didominasi oleh program sosial dan kesehatan, sementara dukungan terhadap program ekonomi produktif perempuan belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran regulator telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan kebijakan yang lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi perempuan secara berkelanjutan (Donaldson & Davis, 1989; Kurniawati, 2019).

Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Peran pemerintah desa sebagai dinamisator tercermin dari upaya aktif dalam menggerakkan dan memotivasi partisipasi perempuan dalam kegiatan PKK. Pemerintah desa memberikan bimbingan, pengarahan, serta motivasi persuasif kepada kader PKK dan masyarakat. Pendekatan komunikatif dan partisipatif ini menciptakan iklim sosial yang kondusif, sehingga perempuan merasa dihargai dan didukung untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, khususnya pemanfaatan pekarangan dan pengembangan usaha rumah tangga (Wulandari & Fauzi, 2022).

Peran dinamisator ini juga dapat dijelaskan melalui konsep Interaksionisme Simbolis yang dikemukakan oleh George Herbert Mead, di mana simbol-simbol sosial seperti seragam PKK, sertifikat pelatihan, dan slogan organisasi berperan dalam membangun makna, identitas, dan motivasi sosial perempuan. Selain itu, Teori Pertukaran Sosial memperkuat temuan ini dengan menjelaskan bahwa partisipasi perempuan akan berkelanjutan apabila manfaat yang diperoleh dianggap sebanding dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan.

Namun demikian, efektivitas peran dinamisator masih menghadapi kendala struktural. Sebagaimana dijelaskan pada subbab kendala, partisipasi perempuan cenderung fluktuatif karena kesibukan utama ibu-ibu di sektor pertanian dan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peran dinamisator berhasil memotivasi partisipasi awal, keberlanjutan partisipasi belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif, seperti fleksibilitas waktu kegiatan dan penguatan manfaat ekonomi yang nyata bagi perempuan.

Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam program PKK di Desa Karya Makmur tercermin melalui penyediaan sarana, prasarana, dan dukungan teknis bagi kegiatan pemberdayaan perempuan. Pemerintah desa memfasilitasi program PKK melalui alokasi dana desa, penyediaan tempat pertemuan, perlengkapan pelatihan, serta kerja sama lintas sektor dengan puskesmas dan dinas terkait. Peran ini sejalan dengan Teori Peran menurut Biddle dan Thomas yang menekankan fungsi pemerintah sebagai pembimbing dan pendukung masyarakat.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fasilitasi yang diberikan masih menghadapi keterbatasan, terutama pada aspek pendanaan program ekonomi produktif. Fasilitasi yang tersedia cenderung mencukupi untuk kegiatan sosial dan rutin, tetapi belum mampu mendukung kebutuhan skala ekonomi seperti pengadaan alat produksi, sertifikasi produk, dan pemasaran hasil usaha perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip Stewardship (Donaldson & Davis, 1989) dalam pengelolaan sumber daya untuk pemberdayaan ekonomi perempuan masih perlu ditingkatkan.

Peran fasilitator pemerintah desa juga relevan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menekankan pentingnya akses perempuan terhadap pelatihan, modal, dan jejaring usaha. Dengan demikian, penguatan peran fasilitator menjadi kunci dalam meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian perempuan desa.

Faktor Kendala Pelaksanaan Program PKK dalam Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan di Desa Karya Makmur, meskipun menunjukkan komitmen pemerintah desa, masih menghadapi kendala yang memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program. Berdasarkan analisis data, kendala tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor ini saling berpengaruh dan secara kolektif membatasi optimalisasi pemberdayaan perempuan di tingkat desa.

Faktor Internal

Faktor internal merupakan kendala yang bersumber dari sistem pemerintah desa dan organisasi PKK, terutama terkait kapasitas sumber daya. Temuan menunjukkan bahwa kendala internal paling dominan adalah keterbatasan anggaran atau modal usaha yang dialokasikan bagi program PKK. Anggaran PKK belum dapat mendukung program ekonomi produktif secara luas karena dana desa harus dibagi dengan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya. Akibatnya, cakupan pelatihan keterampilan, ketersediaan fasilitas, serta kemampuan menghadirkan narasumber ahli berkualitas masih terbatas, sehingga program yang berorientasi pada penguatan ekonomi perempuan belum berjalan maksimal.

Dalam perspektif Teori Peran, kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara *role expectation* dan *role performance*. Masyarakat memiliki harapan agar pemerintah desa dapat memfasilitasi program PKK secara komprehensif, termasuk pada aspek peningkatan ekonomi perempuan. Namun, keterbatasan anggaran menghambat pemerintah desa dalam menjalankan perannya secara optimal sebagai regulator dan fasilitator (Soerjono Soekanto &

Silouw, 2016). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh komitmen, tetapi juga oleh kecukupan sumber daya yang menopang pelaksanaan peran pemerintah desa.

Sebagai upaya mengurangi ketergantungan program terhadap keterbatasan anggaran, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah penguatan pemanfaatan pekarangan melalui gagasan "Destinasi Kebun PKK Karya Makmur". Inisiatif ini diarahkan untuk mengelola kebun PKK dengan tanaman sayuran dan tanaman produktif, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan keluarga sekaligus menghasilkan pendapatan tambahan melalui penjualan hasil panen. Program ini juga dapat menjadi sarana edukasi berbasis praktik mengenai teknik budidaya dan pengelolaan hasil panen. Strategi tersebut sejalan dengan Teori Stewardship yang menekankan pemerintah sebagai *steward* yang berkewajiban mengelola sumber daya demi kepentingan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan (Donaldson & Davis, 1989), sekaligus menegaskan pentingnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola dukungan dan sumber daya agar pemberdayaan berjalan efektif (Kurniawati, 2019).

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kendala yang berasal dari lingkungan sosial masyarakat di luar struktur pemerintah desa dan organisasi PKK. Temuan menunjukkan bahwa kendala eksternal utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat perempuan dalam kegiatan PKK. Banyak ibu-ibu tidak dapat terlibat secara konsisten karena kesibukan rumah tangga dan pekerjaan di sektor pertanian maupun usaha informal. Dampaknya, kehadiran peserta sering tidak penuh dan partisipasi cenderung fluktuatif, sehingga program sulit berjalan secara berkelanjutan.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui Teori Pertukaran Sosial. Teori ini menyatakan bahwa individu akan berpartisipasi dalam suatu kegiatan apabila manfaat yang diperoleh dianggap sebanding dengan biaya yang dikeluarkan (George Homans dalam Silouw, 2016). Dalam Desa Karya Makmur, sebagian perempuan memandang bahwa biaya yang harus ditanggung, terutama waktu dan tenaga yang "diambil" dari pekerjaan domestik maupun aktivitas ekonomi, lebih besar daripada manfaat yang diterima. Ketika hasil program tidak dirasakan secara cepat dan jelas, motivasi untuk berpartisipasi cenderung menurun.

Sebagai pembanding, penelitian di Desa Ujung Serdang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan meningkat ketika pemerintah desa dan kader PKK memiliki komitmen kuat, serta program disesuaikan dengan kebutuhan dan minat perempuan, misalnya pelatihan menjahit, memasak, dan kerajinan tangan yang berbasis potensi lokal dan diarahkan pada pembentukan kelompok usaha produktif (Hermawan et al., 2021). Temuan tersebut menegaskan bahwa program yang relevan dan berdampak nyata dapat memperkuat persepsi manfaat serta meningkatkan partisipasi.

Dengan demikian, untuk mengatasi kendala eksternal ini pemerintah desa perlu memperkuat komunikasi dan sosialisasi mengenai manfaat program PKK agar perempuan memahami nilai praktis kegiatan, khususnya manfaat ekonomi dan peningkatan kapasitas. Selain itu, pemerintah desa perlu memperluas kolaborasi dengan pihak eksternal seperti dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat guna memperoleh dukungan pelatihan, pendampingan, dan pembinaan. Strategi ini diharapkan dapat mengubah persepsi sebagian masyarakat yang masih memandang PKK sebatas kegiatan sosial rutin, sehingga partisipasi perempuan dapat meningkat dan tujuan pemberdayaan perempuan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Karya Makmur telah menjalankan peran strategis dalam pemberdayaan perempuan melalui Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Peran regulator diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dan peraturan desa serta pengalokasian dana desa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program PKK. Peran dinamisator terlihat dari upaya pemerintah desa dalam menggerakkan dan memotivasi partisipasi perempuan melalui pendekatan komunikatif, interaksionisme simbolis, dan pertukaran sosial yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Sementara itu, peran fasilitator diwujudkan melalui penyediaan sarana, prasarana, serta dukungan akses seperti tempat kegiatan, peralatan, dan narasumber pelatihan. Namun, pelaksanaan program PKK masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran (faktor internal) dan rendahnya partisipasi sebagian perempuan akibat kesibukan rumah tangga dan pekerjaan (faktor eksternal). Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa mulai mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal melalui pengembangan *Destinasi Kebun PKK Karya Makmur* sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan, membuka peluang pendapatan alternatif, serta mengurangi ketergantungan pada anggaran desa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah desa dan pengurus PKK meningkatkan kualitas dan efektivitas pemberdayaan perempuan dengan mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, memperkuat strategi komunikasi dan sosialisasi mengenai manfaat kegiatan PKK, serta memperluas kerja sama dengan pihak eksternal seperti dinas terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung pelatihan dan pendampingan. Di sisi lain, masyarakat perempuan diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengikuti kegiatan PKK dan memanfaatkan pelatihan yang telah difasilitasi guna meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha ekonomi produktif, dan memperkuat kemandirian keluarga. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus PKK, dan masyarakat, program PKK di Desa Karya Makmur diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan, keluarga, dan masyarakat desa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Amaliatulwalidan, & Angraini, N. (2019). Peran PKK dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Tingkat Desa. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, *3*(2), 45–53.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1989). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, *16*(1), 49–64.

Fanzikri. (2019). Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, *7*(1), 15–22.

Hanis, H., & Marzaman. (2020). PKK Sebagai Wadah Pemberdayaan Perempuan di Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 30–37.

Hermawan, R., Sutrisno, E., & Suharto, E. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*. Deepublish.

Kurniawati, R. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Implementasi Teori Stewardship. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan Desa*, *7*(2), 67–74.

Nurhayati. (2018). Ketimpangan Gender dalam Pembangunan. *Jurnal Kesetaraan Dan Pemberdayaan Gender*, *4*(1), 22–29.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Silouw, E. (2016). Pemahaman Teori Peran dalam Konteks Sosial. *Jurnal Teori Dan Praktik Sosiologi*, *4*(1), 20–28.

Trisnawati, E., & Jatiningsih, O. (2017). Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Peran Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Gender Dan Pembangunan*, *6*(2), 58–66.